

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Istilah penduduk digunakan untuk menggambarkan individu yang telah menetapkan domisili di wilayah geografis tertentu selama minimal enam bulan. Ini mencakup mereka yang telah tinggal di daerah tersebut selama periode tersebut dan mereka yang telah tinggal di sana selama < 6 enam bulan namun memiliki niat untuk menetap. (Sulistiyawati, 2011:1).

Sebagai negara berkembang, Indonesia juga menghadapi tantangan besar terkait kependudukan. Dinamika kependudukan negara ini dibentuk oleh empat isu utama: 1) tingkat laju pertumbuhan yang tinggi, 2) distribusi penduduk yang tidak merata di berbagai kelompok umur, 3) struktur usia muda, dan 4) jumlah penduduk dengan kualitas yang kurang optimal (Melani, dkk., 2010:24).

Keempat permasalahan yang diuraikan di atas merupakan kondisi yang menghambat kapasitas masyarakat untuk terlibat sebagai agen aktif dalam proses pembangunan, dan karenanya dianggap sebagai beban kolektif. Apabila dianalisis lebih detail menunjukkan bahwa sumber utama dari masalah tersebut adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan berkelanjutan, yang telah berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa jumlah penduduk yang telah mencapai jumlah yang cukup besar, yang menghasilkan tantangan yang signifikan.

Dari keempat masalah kuantitatif tersebut, yang paling signifikan adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat tentu saja

menimbulkan tantangan untuk memenuhi kebutuhan dan menanggulangi dampak yang ditimbulkannya. Hal ini dapat menghambat upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Semakin besar pertumbuhan penduduk, semakin berat pula upaya untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan tidak dibatasi akan menimbulkan dampak yang merugikan di berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Lebih jauh lagi, hal tersebut akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan pembangunan nasional.

Guna mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk, Indonesia telah memulai program Keluarga Berencana (KB) pada tahun 1970 dan telah terbukti efektif. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibentuk untuk mengawasi program ini. Tujuan dari program Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dengan mempromosikan penundaan perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan penguatan ketahanan keluarga untuk mendorong kesejahteraan ekonomi, spiritual, sosial, dan budaya.

Tujuan dari manajemen kependudukan dan pembangunan keluarga adalah untuk mengarahkan pertumbuhan penduduk dan keluarga dengan cara yang menjamin kelahiran penduduk yang seimbang dan peningkatan mutu penduduk.

Program pemerintah tentang Keluarga Berencana (KB) dirancang dengan tujuan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Dalam rangka mengatur kelahiran, mendorong jarak kelahiran, dan menetapkan usia ideal untuk melahirkan, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mengatur kehamilan melalui pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak reproduksi, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Penerapan strategi keluarga berencana merupakan pendekatan yang sangat efektif guna memaksimalkan ketahanan, kesehatan, dan keamanan keluarga, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan ibu, anak, dan perempuan. Penyediaan layanan keluarga berencana mencakup penyebaran informasi, penyampaian sumber daya pendidikan, dan fasilitasi proses pengambilan keputusan mengenai waktu melahirkan anak, jumlah anak yang diinginkan, jarak kelahiran, dan penghentian kelahiran anak. Proses penyesuaian kebijakan kependudukan memerlukan implementasi pertumbuhan, pembangunan, dan tujuan yang mengarahkan jumlah kelahiran, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendekatan ini memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pengendalian program keluarga berencana dan sektor pertumbuhan lainnya secara menyeluruh.

Sesuai pada UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, urusan tersebut termasuk dalam lingkup urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Kewenangan untuk mengawasi urusan tersebut secara konsisten berada di tangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014). Undang-undang tersebut menetapkan empat kewenangan bersama, yaitu: (1) pengendalian penduduk; (2) keluarga berencana (KB); dan (3) kesejahteraan keluarga. Pemerintah pusat bertugas mengelola penyuluh KB/PLKB, menstandarisasi layanan KB, dan mensertifikasi penyuluh KB (Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)). Tanggung jawab utama Konselor Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah memberikan layanan konseling dan informasi, edukasi, dan komunikasi (KIE), serta konseling untuk program kependudukan KB dan KR. Selain itu, mereka bertugas memberikan konseling dan KIE untuk program yang berfokus pada ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan, serta peningkatan kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana.

Secara umum, terdapat beberapa aspek permasalahan kependudukan, yaitu struktur usia muda dan kondisi kependudukan, di mana persebaran penduduk antar wilayah belum menyeluruh sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Studi tentang tingkat pertumbuhan penduduk dapat berkontribusi pada pengurangan peningkatan penurunan yang menyertai proses penuaan, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan program keluarga berencana oleh pemerintah pada tahun 1970. Tujuannya adalah untuk melengkapi kebutuhan pelayanan keluarga berencana agar tercipta pelayanan kesehatan dengan struktur organ dalam dan luar yang sesuai dengan pengendalian jumlah kelahiran. Keluarga berencana memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan dukungan untuk mencapai kesehatan ibu dan

bayi, pengurangan dampak kematian pada wanita melalui penundaan kehamilan sampai usia kehamilan yang matang, dan pembatasan kehamilan ketika anak telah cukup berkembang, sehingga menghilangkan risiko pada wanita.

Program KB didesain untuk membina pertumbuhan keluarga yang stabil dan sejahtera, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka yang menerima pelayanan Keluarga Berencana. Jumlah penduduk yang besar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk diperlukan pendirian lembaga-lembaga dan instansi-instansi yang perannya untuk menanggapi permasalahan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pertumbuhan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menetapkan kebijakan pembangunan keluarga yang membangun ketahanan dan kesejahteraan dalam kesatuan keluarga. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Republik Indonesia.

Meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, dan masyarakat dapat dilakukan dengan KB. Adanya keberhasilan pelaksanaan program KB, berharap angka kelahiran akan menurun, sehingga mencegah laju pertumbuhan penduduk melebihi kapasitas untuk meningkatkan produktivitas. Diharapkan bahwa pendekatan ini akan berkontribusi pada peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat individu, pengendalian kelahiran biasanya dimotivasi oleh pertimbangan ekonomi, terutama pada masyarakat yang ekonominya lemah.

Terwujudnya manusia yang berkualitas bergantung pada keluarga yang berkualitas. Modal awala dan faktor terbesar dalam pembangunan adalah penduduk, sehingga menjadi titik tengah dalam pembangunan di kemudian hari. Banyaknya penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah dan pertumbuhan yang cepat akan menghambat tercapainya kondisi ideal antara kualitas dan kuantitas. Pengembangan kualitas dan peningkatan kualitas diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan. Penting untuk mempertimbangkan peran penduduk dan keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Statistik kependudukan memainkan peran penting dalam memajukan pemahaman kita tentang fenomena empiris, yang pada gilirannya menginformasikan pengembangan kerangka kerja teoritis baru. Kerangka kerja ini kemudian diuji secara empiris lebih lanjut, sebuah proses yang dapat diulang seiring dengan munculnya data baru. Salah satu strategi untuk mengatasi tantangan pertumbuhan penduduk adalah dengan memprioritaskan pelaksanaan program keluarga berencana.

Tabel 1. 1 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Lahir Mati, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang, 2021

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Bayi Lahir <i>Birth</i>	Bayi Lahir Mati <i>Stillborn babies</i>	Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) <i>Low Birth Weight Babies</i>	Gizi Buruk <i>Malnutrition</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumber	460	10	33	3
Bulu	316	5	28	3
Gunem	281	5	24	3
Sale	459	5	24	4
Sarang	946	5	67	6
Sedan	849	7	31	4
Pamotan	679	3	28	4
Sulang	440	3	22	4
Kaliori	504	4	21	1
Rembang	1 147	4	40	5
Pancur	376	2	26	3
Kragan	869	1	48	6
Sluke	382	5	20	-
Lasem	731	1	20	2
<b>Rembang</b>	<b>8 419</b>	<b>49</b>	<b>432</b>	<b>48</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kanbupaten Rembang

Angka kelahiran yang tinggi, yakni 8.419 bayi lahir di Kabupaten Rembang pada tahun 2021, mencerminkan tantangan dalam pengendalian kelahiran yang mungkin terkait dengan efektivitas program Keluarga Berencana (KB). Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi atau tidak konsistennya akses dan edukasi mengenai KB dapat menjadi penyebab utama. Dalam beberapa kasus, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB atau keterbatasan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, turut memengaruhi keberhasilan program tersebut. Program KB

yang kurang efektif dapat menyebabkan angka kelahiran yang tinggi, yang kemudian berpotensi memperburuk kondisi kesehatan ibu dan bayi, seperti bayi lahir mati atau berat badan lahir rendah (BBLR).

Selain itu, angka bayi berat badan lahir rendah (432 kasus) dan bayi bergizi buruk (48 kasus) juga dapat menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kesehatan reproduksi dan prakonsepsi ibu. Hal ini dapat dikaitkan dengan minimnya pengawasan kesehatan ibu hamil dalam program KB, yang seharusnya mencakup edukasi mengenai asupan gizi dan pengelolaan kehamilan. Penggunaan alat kontrasepsi yang efektif tidak hanya bertujuan menunda atau mengatur jarak kelahiran, tetapi juga memastikan kesiapan kesehatan ibu sebelum kehamilan. Ketidakefisienan dalam program ini dapat memicu tingginya angka kelahiran yang tidak direncanakan, sehingga menghambat fokus pada kesejahteraan bayi yang dilahirkan. Oleh karena itu, peningkatan akses, pendidikan, dan monitoring program KB menjadi krusial dalam menekan angka-angka tersebut.

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam KLHS RPJMD Kabupaten Rembang untuk periode 2021-2026 adalah perlunya meningkatkan efektivitas langkah-langkah pengendalian penduduk. Selain itu, Kabupaten Rembang mendukung inisiatif pemerintah terkait pengendalian penduduk. Pada tahun 2016, Total *Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Rembang berdasarkan hasil Susenas sebesar 2,05. Selanjutnya, data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Rembang menunjukkan adanya peningkatan Angka Fertilitas Total (TFR) menjadi 2,1 pada tahun 2020. Angka kesuburan total (TFR)



menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dimiliki seorang wanita pada akhir masa reproduksinya.

Lembaga KB mejadi sarana pemerintah untuk memberikan keterangan dan juga mengatur adanya alat kontrasepsi. Oleh karena itu, masyarakat wajib berkonsultasi dengan penyuluh keluarga berencana. Penyuluh keluarga berencana (PKB) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas memberikan layanan konseling, melakukan evaluasi, dan mengembangkan program keluarga berencana nasional. Mereka diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut dan bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran program tersebut. Selain penyuluh tersebut, kegiatan ini juga melibatkan petugas lapangan keluarga berencana, baik pegawai negeri sipil maupun non-pegawai negeri sipil. Mereka ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertugas memberikan layanan konseling, melakukan evaluasi, dan mengembangkan program keluarga berencana.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, telah terjadi cakupan peserta KB aktif sebesar 100 persen di Kabupaten Rembang. Proporsi pasangan usia subur yang memiliki kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi diperkirakan sebesar 6,73% pada tahun 2016. Angka ini meningkat menjadi 10,82% pada tahun 2020. Perkembangan *Unmet Need* dari tahun 2016- 2020 cenderung dengan tren meningkat. Meningkatnya kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi dibentuk oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaan dalam program keluarga berencana, khususnya di kalangan pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan pasangan usia subur (PUS) yang berupaya untuk memiliki anak atau menunda kelahiran melalui penggunaan keluarga berencana. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi *Unmet Need* KB antara lain melalui

optimalisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (SDM PLKB), peningkatan kepesertaan KB Pria, dan kerjasama antar berbagai institusi.

Tabel 1. 2 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 di Kabupaten Rembang, 2018-2022

<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Sumber	79,53	77,90	79,69	79,69	79,25
Bulu	82,75	80,39	79,61	79,61	79,28
Gunem	79,75	81,58	84,31	84,31	77,20
Sale	81,86	80,02	78,22	78,22	81,47
Sarang	76,9	76,42	70,74	70,74	73,10
Sedan	81,61	80,9	79,43	79,43	80,27
Pamotan	82,95	79,25	79,49	79,49	78,40
Sulang	84,13	82,20	80,33	80,33	82,31
Kaliori	82,16	80,35	78,04	78,04	79,92
Rembang	76,47	79,40	77,26	77,26	78,91
Pancur	79,90	81,32	76,38	76,38	79,09
Kragan	81,01	80,17	78,64	78,64	76,81
Sluke	75,06	73,79	73,70	73,70	85,96
Lasem	79,46	81,76	79,36	79,36	79,84
<b>Kabupaten Rembang</b>	<b>80,10</b>	<b>79,58</b>	<b>77,89</b>	<b>77,89</b>	<b>78,99</b>

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Meskipun angka pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Rembang menunjukkan angka yang relatif stabil antara 80,10 pada tahun 2018 hingga 78,99 pada tahun 2022, terdapat penurunan signifikan pada tahun 2020 (77,89) yang perlu menjadi perhatian. Penurunan tersebut dapat mengindikasikan adanya masalah dalam keberlanjutan program keluarga berencana, seperti gangguan akses layanan kesehatan, penurunan

kesadaran masyarakat, atau dampak dari pandemi COVID-19 yang menghambat pelayanan kontrasepsi. Walaupun angka pemakaian sedikit pulih pada tahun 2022, penurunan yang terjadi pada tahun 2020 tetap menjadi masalah yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebabnya dan untuk memastikan bahwa kebijakan serta program kontrasepsi dapat terus dioptimalkan agar lebih efektif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Rembang.

Tabel 1. 3 Jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Rembang, 2018-2022

<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Sumber	6 324	5 869	5 673	5 700	5 614
Bulu	5 026	4 853	4 731	4 584	5 502
Gunem	4 585	4 720	4 891	4 835	4 093
Sale	7 601	6 405	5 442	5 710	8 426
Sarang	10 663	10 633	8 908	9 102	8 763
Sedan	10 395	10 443	10 488	11 008	5 500
Pamotan	7 700	7 273	7 157	6 788	11 788
Sulang	6 812	6 636	5 602	5 492	4 463
Kaliori	7 533	7 291	6 518	6 103	6 927
Rembang	12 528	13 100	12 301	12 291	6 025
Pancur	4 690	4 676	4 285	4 338	11 205
Kragan	12 018	12 233	11 010	11 222	6 108
Sluke	5 545	5 135	5 271	5 397	4 433
Lasem	6 969	7 076	6 635	6 667	4 601
<b>Kabupaten Rembang</b>	<b>108 389</b>	<b>106 343</b>	<b>98 912</b>	<b>99 237</b>	<b>93 448</b>

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

#### Kabupaten Rembang

Lebih lanjut, data tersebut mengungkapkan bahwa Penurunan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Rembang, dari 108.389 pada tahun 2018 menjadi 93.448 pada tahun 2022, menunjukkan tren yang memprihatinkan dalam partisipasi

masyarakat terhadap program Keluarga Berencana. Penurunan ini dapat mencerminkan sejumlah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KB, baik dari sisi aksesibilitas layanan, efektivitas sosialisasi, maupun keberlanjutan penyediaan pelayanan. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi penurunan ini adalah kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya pengaturan kelahiran. Banyak masyarakat yang mungkin tidak memahami dampak jangka panjang dari perencanaan keluarga terhadap kesejahteraan, seperti peningkatan kualitas hidup anak-anak, kesehatan ibu, dan stabilitas ekonomi keluarga. Rendahnya tingkat kesadaran ini seringkali diperburuk oleh terbatasnya komunikasi antara petugas KB dengan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang sulit dijangkau.

Selain itu, pandemi COVID-19 yang terjadi dalam kurun waktu tersebut dapat menjadi penyebab signifikan. Selama pandemi, fokus dan sumber daya kesehatan sebagian besar dialihkan untuk penanganan COVID-19, sehingga program-program kesehatan lainnya, termasuk KB, mengalami pengurangan intensitas. Banyak pos pelayanan KB yang terpaksa menghentikan atau membatasi operasionalnya akibat kebijakan pembatasan sosial. Kondisi ini berdampak langsung pada aksesibilitas alat kontrasepsi dan layanan edukasi KB, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Akibatnya, keberlanjutan program terganggu, dan jumlah peserta aktif KB pun menurun secara signifikan.

Dari sisi sosial dan budaya, norma tradisional yang masih mengutamakan keluarga besar di beberapa kelompok masyarakat menjadi salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan program KB. Banyak keluarga yang enggan menggunakan alat kontrasepsi karena pengaruh adat atau keyakinan tertentu. Selain itu, stigma atau mitos tentang efek samping alat kontrasepsi juga masih menjadi

penghalang, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terpapar informasi medis yang akurat. Di sisi ekonomi, kondisi yang tidak stabil selama pandemi membuat beberapa keluarga tidak mampu membeli alat kontrasepsi, meskipun tersedia subsidi dari pemerintah. Hal ini diperparah oleh minimnya tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan KB secara konsisten di daerah-daerah terpencil. Penurunan ini juga dapat menjadi cerminan perubahan pola pikir masyarakat, di mana prioritas kebutuhan sehari-hari menjadi lebih penting dibandingkan partisipasi dalam program KB. Beberapa keluarga mungkin memandang KB sebagai hal yang tidak mendesak, terutama dalam situasi krisis ekonomi.

Saat pandemi ada perubahan-perubahan yang dilakukan para penyuluh KB di saat ini, diantaranya memaksimalkan media sosial untuk sosialisasi, karena sejak masa pandemi dilarang mengumpulkan banyak orang. Selain itu jumlah penyuluh yang sedikit dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Rembang sehingga satu penyuluh KB bisa sembilan sampai dua puluh desa. Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Rembang berjumlah 294 (dua ratus sembilan puluh empat), namun penyuluh KB hanya ada 44 orang. Jadi setiap penyuluh bisa mendampingi enam sampai tujuh desa atau kelurahan.

Pandangan mengenai program KB terutama berorientasi pada memotivasi suami istri untuk menerapkan kontrasepsi, dengan Angka *Prevalensi Kontrasepsi* (CPR) sebagai indikator utama. Keberhasilan program keluarga berencana tidak dapat ditentukan oleh peningkatan prevalensi kontrasepsi yang teramati, yang dipengaruhi oleh faktor demografi, karena hal ini tidak memberikan gambaran lengkap tentang efektivitas program. Sebaliknya, efektivitas dan durasi penggunaan

kontrasepsi juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program secara keseluruhan. Kehamilan tak diinginkan dapat dicegah dengan penyediaan pelayanan KB yang berkualitas dapat membantu meminimalkan risiko penggantian alat kontrasepsi modern. Kegagalan metode kontrasepsi dapat terjadi pada awal penggantian metode jika alat kontrasepsi tidak digunakan dengan benar. Efektivitas alat kontrasepsi meningkat jika digunakan dengan benar dan terus-menerus, terutama jika alat kontrasepsi tersebut kurang efektif. Kontrasepsi secara spesifik bertujuan untuk mengatur fertilitas dan membatasi kelahiran termasuk faktor demografi seperti jumlah anak hidup. Evaluasi kontrasepsi mencakup penilaian terhadap kemanjuran, potensi efek samping, dan kemudahan penggunaan metode kontrasepsi tertentu. Akses kontrasepsi mencakup ketersediaan metode kontrasepsi, penyebaran informasi tentang metode tersebut melalui media, dan penyediaan informasi tentang sumber layanan kontrasepsi.

Keputusan untuk mengganti metode kontrasepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk masalah kesehatan dan ketidaksesuaian dengan ekspektasi. Karakteristik individu berperan dalam menentukan pilihan metode dan keputusan untuk menghentikan suatu metode kontrasepsi. Individu yang berganti-ganti metode kontrasepsi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Potensi kegagalan kontrasepsi pada awal pergantian metode kontrasepsi, jika tidak digunakan dengan benar, akan meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

Kualitas pelayanan keluarga berencana tergantung pada pandangan klien, yang pada gilirannya mempengaruhi kelangsungan penggunaan. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti pilihan metode, penyediaan informasi, kemampuan teknis

petugas, kualitas hubungan petugas-klien, ketersediaan layanan tindak lanjut, dan kesesuaian konstelasi layanan. Pemilihan metode kontrasepsi secara signifikan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Elemen kualitas pelayanan KB akan membantu memastikan pilihan metode kontrasepsi yang diinginkan dengan aman. Kualitas layanan keluarga berencana merupakan penentu yang signifikan terhadap kelangsungan penggunaan kontrasepsi, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kesuburan. Ketersediaan metode kontrasepsi dalam program keluarga berencana dapat meningkatkan prevalensi kontrasepsi dengan memberikan kesempatan kepada akseptor untuk mengganti metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, memberikan informasi dan konseling yang berkelanjutan dan efektif kepada akseptor keluarga berencana akan meminimalkan risiko penggantian alat kontrasepsi dan memastikan kesetiaan dan kesinambungan penggunaan.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan diatas sudah diuraikan di atas dilakukan suatu penelitian yang melibatkan faktor yang terjadi terkait program KB dan faktor yang mempengaruhi program KB dalam pelaksanaannya. Sehingga hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan studi efektivitas program KB pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk memperbaiki program KB dalam peningkatan kepedulian masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Rembang. Sehingga peneliti tertarik mengambil sebuah judul penelitian **“Efektivitas Program Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menggunakan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Rembang”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berikut ini beberapa masalah yang mungkin terkait dengan efektivitas program KB pada DINSOS PPKB Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kepedulian masyarakat menggunakan alat kontrasepsi :

### 1. Penurunan Jumlah Peserta KB Aktif:

Data menunjukkan adanya penurunan jumlah peserta KB aktif dari 108.389 pada tahun 2018 menjadi 93.448 pada tahun 2022. Tren ini mencerminkan kurang optimalnya program KB dalam mempertahankan partisipasi masyarakat, baik karena hambatan akses, edukasi, maupun kesadaran.

### 2. Kesenjangan Akses dan Pelayanan KB:

Terbatasnya jumlah penyuluh KB (44 orang untuk 294 desa/kelurahan) mengakibatkan kurangnya pendampingan dan sosialisasi yang memadai, terutama di daerah terpencil. Hal ini berdampak pada kesenjangan akses terhadap alat kontrasepsi dan layanan KB.

### 3. Rendahnya Tingkat Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:

Stigma, mitos, serta kurangnya informasi yang akurat tentang alat kontrasepsi masih menjadi kendala utama. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat KB, seperti pengaturan jarak kelahiran dan dampaknya terhadap kesehatan ibu, anak, serta ekonomi keluarga.

### 4. Dampak Pandemi COVID-19:

Pandemi menyebabkan pembatasan operasional pos pelayanan KB, penurunan intensitas kunjungan penyuluh, dan pengalihan fokus layanan



kesehatan ke penanganan COVID-19. Hal ini berdampak langsung pada ketersediaan dan aksesibilitas alat kontrasepsi.

5. Tingkat Pemakaian Kontrasepsi yang Tidak Stabil:

Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) menunjukkan tren fluktuasi dengan penurunan signifikan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan dalam keberlanjutan penggunaan alat kontrasepsi di kalangan masyarakat.

6. Meningkatnya Unmet Need KB:

Proporsi pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhannya meningkat dari 6,73% pada tahun 2016 menjadi 10,82% pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap kontrasepsi dan kemampuan program KB untuk memenuhinya.

7. Pengaruh Norma Budaya dan Ekonomi:

Norma budaya yang mendukung keluarga besar serta keterbatasan ekonomi masyarakat mengurangi minat untuk berpartisipasi dalam program KB. Beberapa keluarga lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dasar daripada menggunakan alat kontrasepsi.

8. Kehamilan Tidak Diinginkan:

Kurangnya efektivitas program KB berdampak pada meningkatnya risiko kehamilan tidak diinginkan. Hal ini disebabkan oleh pergantian metode kontrasepsi yang tidak terkontrol, kurangnya edukasi tentang penggunaan alat kontrasepsi yang benar, serta ketidakberlanjutan penggunaannya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pertimbangan latar belakang di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut

- 1) Bagaimana efektivitas program Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang dalam peningkatan kepedulian masyarakat menggunakan alat kontrasepsi di Kabupaten Rembang?
- 2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat program Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang dalam peningkatan kepedulian masyarakat menggunakan alat kontrasepsi di Kabupaten Rembang?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang dalam peningkatan kepedulian masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat program Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rembang dalam peningkatan kepedulian masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Rembang.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan manfaat dari tiga perspektif berbeda: akademis, teoritis, dan praktis, sebagai berikut.

### 1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan berpedoman pada kajian teori yang didapatkan dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

### 2. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan penulis untuk lebih mengetahui tentang Kualitas Pelayanan bidang administrasi kependudukan.

### 3. Kegunaan Praktis

Masyarakat mampu mendapatkan informasi terkait pentingnya program KB guna laju pertumbuhan penduduk..

## 1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

Penulis, Judul dan Tahun Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
(Mirna Abubakar, Joorie Marhaen Ruru, Very Yohanis Londa) Efektivitas program Konseling Remaja Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado (2020)	Mengetahui efektivitas program konseling remaja di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Manado	Pendekatan kualitatif.	Meski Program Penyuluhan Remaja telah dilaksanakan di DPPKB Kota Manado, namun efektivitasnya masih kurang baik. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terkait dengan kegiatan PIK-R, diketahui bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada DPPKB Kota Manado mencakup satu kegiatan saja.</li><li>2. Walau telah dilaksanakan beberapa strategi integrasi, namun efektivitas proses tersebut masih belum optimal. Selain itu, belum adanya kebijakan khusus dan pengaturan anggaran untuk kegiatan Program PIKR yang saat ini belum memadai untuk mencapai hasil yang diharapkan, yaitu pengurangan masalah kepemudaan di Kota Manado.</li><li>3. Program PIKR memiliki kapasitas untuk diimplementasikan dan diadaptasi secara efektif karena fokusnya pada remaja</li></ol>

			sebagai penerima manfaat utama. Program ini dikelola oleh forum GenRe (Generasi Terencana), sebuah platform yang didedikasikan untuk mengatasi kebutuhan dan masalah khusus kelompok usia ini.
(Qadar Drajat) Efektivitas Program Kampung KB guna membentuk Keluarga yang Berkualitas (Studi Kasus Kampung KB Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi) (2022)	Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan dan keberhasilan program kampung KB di Desa Parijatah Wetan Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, maka diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai program tersebut.	Model penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yang memanfaatkan teknik kualitatif dan kuantitatif.  Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen.	1) Program Kampung KB telah memberikan dampak positif terhadap pembentukan keluarga sejahtera dan berkualitas. Tiga program utamanya, yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan ini, bersama dengan inisiatif BKR, BKL, serta UUPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) 2) Dusun Melik Parijatah Wetan telah dilakukan penyuluhan problematika penanaman tumbuh tumbuhan dapat menolong keuangan masyarakat serta menciptakan lingkungan terawat. 3) Keefektifan suatu strategi implementasi diukur dengan membandingkannya dengan rencana dan proses lain untuk mengetahui efektivitas relatifnya dan sejauh mana hasil yang diharapkan telah tercapai. Untuk menentukan sejauh mana suatu program efektif atau tidak, ukuran efektivitas harus diidentifikasi dan

			dievaluasi. Dalam kasus program Desa Parijatah Wetan, misalnya, program Desa KB dapat dianggap efektif, karena telah menentukan keberhasilan program secara keseluruhan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.
(Theresa Muaya, Sampe, Kumayas) Monica Stefanus Neni Efektivitas Program Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Minahasa (2023)	Untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Peneliti menyimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam penelitian, yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pernah menggunakan KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menggunakan KB, menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Terkait dengan keberhasilan pencapaian hasil yang diharapkan, diketahui bahwa masyarakat umum sudah semakin sadar akan keberadaan program KB ini. Pembentukan inisiatif ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Minahasa. Selain itu, inisiatif ini juga dapat secara efektif mengatur angka kelahiran di Kabupaten Minahasa.
Ester Cristiana, Harlen, dan Any Widayatsari Vinanita Efektivitas	Untuk menganalisis efektivitas program keluarga berencana dalam pengendalian jumlah	Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan	Hasil analisis menunjukkan bahwa program keluarga berencana sangat efektif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau. Hal ini diperkuat oleh peningkatan yang

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Jumlah Penduduk DI Provinsi Riau (2021)	penduduk di Provinsi Riau.	metode kualitatif dengan pendekatan analisis. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, menggunakan pendekatan terarah.	diamati dalam jumlah entitas akseptor dan penurunan bersamaan dalam laju pertumbuhan populasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa inisiatif keluarga berencana memiliki kapasitas untuk mengatur pertumbuhan penduduk secara efektif.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan program keluarga berencana yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan angka kelahiran di Kota Kupang.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan pelayanan program keluarga berencana dan mengetahui kendala-kendala yang melatarbelakanginya, serta mengkaji strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan program keluarga berencana di Kota Kupang.	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar dalam melakukan Pelayanan Program KB. Namun, di balik semua capaian tersebut, efektivitas program masih terkendala oleh beberapa tantangan, antara lain masih kuatnya norma budaya, kurangnya tenaga lapangan, dan terbatasnya sumber daya keuangan.

<p>(Patricia Derer, Philip Cafaro, Frank Gotmark)</p> <p>Population growth, family planning and the Paris Agreement: an assessment of the nationally determined contributions (NDCs) 2022)</p>	<p>Untuk mengetahui upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam memperlambat pertumbuhan penduduk.</p>	<p>Metodologi yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analitis.</p>	<p>Secara keseluruhan, sebagian kecil NDC mengidentifikasi pertumbuhan penduduk sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk membatasi emisi dan bersiap menghadapi dampak iklim. Selain itu, tidak ada NDC yang membahas keluarga berencana secara terperinci atau kuat, meskipun penting untuk adaptasi iklim di masa depan. Beberapa NDC yang menyertakan strategi untuk mengatasi pertumbuhan populasi melakukannya dengan cara yang tidak jelas. Karena keluarga berencana semakin diakui sebagai strategi hemat biaya yang harus memenuhi syarat untuk pendanaan adaptasi, pemerintah yang peduli dengan pertumbuhan penduduk harus didorong untuk memasukkan program keluarga berencana dalam program multisektoral mereka</p>
<p>Rahma Hassan, Amiya Bhatia, Anja Zinke-Allmang, Amy Shipow, Concilia Ogolla, Kritika Gorur, Beniamino Cislighi</p> <p><i>Navigating family planning access during Covid-19: A</i></p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan dampak pandemi terhadap pengaruh normatif yang diberikan oleh pasangan, teman sebaya, dan penyedia layanan kesehatan keluarga berencana.</p>	<p>Model penelitian ini memakai model penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara</p>	<p>COVID-19 mengubah konteks pengaruh normatif pada KB:</p> <p>ketidakamanan finansial, bertambahnya waktu di rumah bersama suami atau orang tua, dan terbatasnya akses untuk mencari dukungan petugas kesehatan, teman, dan orang lain di jejaring sosial mereka memengaruhi cara perempuan menegosiasikan akses KB yang digunakan di dalam rumah.</p>



<p><i>qualitative study of young women's access to information, support and health services in peri-urban Nairobi (2022)</i></p>			
<p>(Stuart Gietel-Basten, Xuehui Han, Yuan Cheng)</p> <p><i>Assessing the impact of the "one-child policy" in China: A synthetic control approach.</i></p> <p>(2019)</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak kebijakan pengendalian populasi di China, terutama kebijakan satu anak, dengan menggunakan pendekatan kontrol sintetis.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kontrol sintetis untuk mengevaluasi dampak kebijakan pengendalian populasi di China, terutama kebijakan satu anak, pada berbagai variabel seperti tingkat fertilitas, pertumbuhan</p>	<p>Kebijakan kontrol populasi yang diterapkan sejak 1973, yang lebih longgar daripada kebijakan satu anak yang lebih ketat yang diterapkan sejak 1979, akan menghasilkan penurunan tingkat kelahiran yang sama jika China mengikuti jalur pembangunan standar. Namun, kebijakan satu anak yang lebih ketat telah dikaitkan dengan konsekuensi negatif seperti ketimpangan rasio jenis kelamin, keluarga shidu fumu yang kehilangan anak tunggal mereka, dan tantangan dalam pengembangan sistem keluarga dan perilaku individu.</p>

		populasi, demografi, pasar tenaga kerja, dan hasil keluarga	
(Holly Ashford) <i>Population Control, Development, And Ghana's National Family Planning Programme 1960-1972</i> (2020)	Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi sejarah kebijakan pengendalian populasi dan keluarga berencana di Ghana dari tahun 1960-an hingga 1970-an, dan untuk menganalisis interaksi yang kompleks dari faktor-faktor lokal dan global yang membentuk kebijakan-kebijakan tersebut	Metode kualitatif. Penulis menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk laporan pemerintah, artikel akademik, dan bahan arsip dari koleksi Dewan Kependudukan.	Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil penelitian ini, antara lain: 1. Program perencanaan keluarga di Ghana diimplementasikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan populasi dan mempromosikan pembangunan ekonomi. 2. Diskursus yang menghubungkan perencanaan keluarga dengan pembangunan ekonomi nasional dan global memungkinkan dan melegitimasi kebijakan populasi yang diimplementasikan oleh pemerintah Ghana. 3. Ada tekanan dari organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk mengimplementasikan program perencanaan keluarga di Ghana. 4. Program perencanaan keluarga di Ghana tidak hanya merupakan imposisi dari atas, tetapi juga ada dorongan dari masyarakat untuk mengurangi jumlah anak yang dilahirkan. 5. Ada kritik terhadap program perencanaan keluarga di Ghana, termasuk kritik terhadap

			<p>metode yang digunakan dan kegagalan program dalam menurunkan tingkat kelahiran.</p> <p>6. Studi tentang program perencanaan keluarga di Ghana dan negara-negara lain di Afrika menunjukkan bagaimana visi pembangunan terkait dengan keputusan untuk mengimplementasikan kebijakan populasi yang pada akhirnya bersifat politis.</p>
<p>(Tesfalem Tilahun Yemane, Getahun Gebre Bogale, Gudina Egata, and Tilahun Kassa Tefera)</p> <p><i>Postpartum Family Planning Use and Its Determinants among Women of the Reproductive Age Group in Low-Income Countries of Sub-Saharan Africa: A Systematic Review and Meta-Analysis</i></p> <p>(2021)</p>	<p>Untuk mengidentifikasi prevalensi penggunaan KB modern pasca persalinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di negara-negara berpenghasilan rendah di Afrika Sub-Sahara.</p>	<p>Metode yang digunakan adalah <i>systematic review</i> dan <i>meta-analysis</i>.</p>	<p>Pemanfaatan kontrasepsi pasca persalinan masih rendah dan belum optimal dibandingkan dengan rekomendasi global pada postpartum keluarga Berencana. Peningkatan global dalam kontrasepsi pascapersalinan dapat membantu mengurangi kematian ibu dan anak dan meningkatkan taraf hidup perempuan dan keluarganya.</p>

Sumber: Hasil olahan penulis

Sesuai dengan informasi yang disajikan pada Tabel 1.3, penelitian awal yang dilakukan oleh Mirna Abubakar, Joorie Marhaen Ruru, dan Very Yohanis Londa dengan judul “Efektivitas Program Penyuluhan Remaja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado”, menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas program konseling remaja di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program konseling remaja di DPPKAD Kota Manado masih kurang baik hal ini disebabkan belum maksimalnya penerapan integrasi serta kebijakan terkait kegiatan program PIKR, dan anggaran pendapatan yang minim. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian terdahulu berfokus pada konseling remaja sedangkan penelitian penulis berfokus pada program KB. Selain itu perbedaan pada lokasi penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, penelitian terdahulu berlokasi di Kota Manado sedangkan penelitian penulis berlokasi Kabupaten Rembang.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Qadar Drajat dengan judul “Efektivitas Program Kampung KB Dalam Membentuk Keluarga yang Berkualitas (Studi Kasus Kampung KB Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)” Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan keberhasilan program Kampung KB di Desa Parijatah Wetan Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa Program kampung KB memberikan hal positif untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan sejahtera melalui tiga program unggulan seperti program pengendalian penduduk, program pelayanan KB, program pembangunan keluarga juga dengan BKR, BKL, serta UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sedangkan penelitian penulis berlokasi Kabupaten Rembang.

Pada penelitian ketiga, Theresa Monica Muaya, Stefanus Sampe, dan Neni Kumayas meneliti dampak Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa. Mereka memaparkan hasil penelitiannya dalam judul "Efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Minahasa". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana telah meningkat, sehingga berpotensi untuk mewujudkan masyarakat Minahasa yang lebih sejahtera dan seimbang. Lebih jauh lagi, penelitian ini menunjukkan bahwa angka kelahiran di Kabupaten Minahasa dapat dikelola secara efektif. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian terdahulu

berlokasi di Kabupaten Minahasa sedangkan penelitian penulis berlokasi Kabupaten Rembang.

Penelitian keempat yang ditulis oleh Ester Vinanita Cristiana, Harlen, dan Any Widyasari, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Jumlah Penduduk DI Provinsi Riau” metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas program keluarga berencana dalam pengendalian jumlah penduduk di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program keluarga berencana sangat efektif dalam mengendalikan jumlah penduduk di Riau. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Provinsi Riau sedangkan penelitian penulis berlokasi Kabupaten Rembang.

Penelitian kelima yang ditulis oleh Yanuarius David Nda dengan judul “Efektivitas Pelayanan Program Keluarga Berencana Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Mengendalikan Angka Kelahiran di Kota Kupang” pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan program keluarga berencana dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya, serta mengkaji strategi yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penyediaan layanan keluarga berencana di Kota Kupang. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas layanan Program Keluarga Berencana yang disediakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang patut dipuji.

Namun, terlepas dari hasil positif tersebut, efektivitas program masih terkendala oleh beberapa faktor, termasuk adanya norma-norma budaya yang sudah mengakar kuat, kurangnya tenaga lapangan, dan keterbatasan dana. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Kota Kupang sedangkan penelitian penulis berlokasi Kabupaten Rembang.

Penelitian keenam yang ditulis oleh Patricia Derer, Philip Cafaro, Frank Gotmark dengan pendekatan kualitatif analisis berjudul *“Population growth, family planning and the Paris Agreement: an assessment of the nationally determined contributions (NDCs)”*. Mengetahui upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam memperlambat pertumbuhan penduduk merupakan tujuan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi hemat biaya yang harus memenuhi syarat untuk pendanaan adaptasi, pemerintah yang peduli dengan pertumbuhan penduduk harus didorong untuk memasukkan program keluarga berencana dalam program multisektoral. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pilihan lokasi: penelitian sebelumnya dilakukan di Paris, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Rembang. Pilihan ini berdampak pada pemberian kontribusi yang lebih efektif bagi bidang ini.

Penelitian ketujuh yang ditulis oleh Rahma Hassan, Amiya Bhatia, Anja Zinke-Allmang, Amy Shipow, Concilia Ogolla, Kritika Gorur, Beniamino Cislighi dengan judul *“Navigating family planning access during Covid-19: A qualitative study of young women’s access to information, support and health services in peri-urban Nairobi”* penelitian ini

menggunakan model kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandemi mempengaruhi pengaruh normatif yang diberikan oleh mitra, teman sebaya, dan penyedia layanan kesehatan KB. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari COVID-19 mengubah konteks pengaruh normatif pada KB seperti ketidakamanan finansial, bertambahnya waktu di rumah bersama suami atau orang tua, dan terbatasnya akses untuk mencari dukungan petugas kesehatan, teman, dan orang lain di jejaring sosial mereka memengaruhi cara perempuan menegosiasikan akses KB yang digunakan di dalam rumah. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Nairobi sedangkan penelitian penulis berlokasi Kabupaten Rembang selain itu perbedaan terletak pada fokus dari penelitian terdahulu adalah dampak dari COVID-19 sedangkan penelitian ini lebih general.

Studi kedelapan, yang ditulis oleh Stuart Gietel-Basten, Xuehui Han, dan Yuan Cheng, berjudul "Assessing the impact of the 'one-child policy' di Tiongkok: Pendekatan pengendalian sintetis." Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan pengendalian sintetis untuk menilai dampak kebijakan pengendalian populasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak kebijakan pengendalian populasi di China, terutama kebijakan satu anak, dengan menggunakan pendekatan kontrol sintetis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kontrol yang diterapkan sejak 1973 untuk mengatur populasi lebih longgar dari kebijakan yang diterapkan pada tahun 1979 hal ini menyebabkan penurunan



angka kelahiran, kesimpulannya ialah penerapan kebijakan yang ketat akan mempengaruhi hasil angka kelahiran. Perbedaan pada penelitian ini adalah perbedaan lokasi dimana lokasi penelitian terdahulu terletak di China dan penelitian ini di Kabupaten Rembang.

Penelitian kesembilan yang ditulis oleh Holly Ashford dengan judul *“Population Control, Development, And Ghana's National Family Planning Programme 1960-1972”* penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk laporan pemerintah, artikel akademik, dan bahan arsip dari koleksi Dewan Kependudukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejarah kebijakan pengendalian populasi dan keluarga berencana di Ghana dari tahun 1960-an hingga 1970-an, dan untuk menganalisis interaksi yang kompleks dari faktor-faktor lokal dan global yang membentuk kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program perencanaan keluarga di Ghana dan negara-negara lain di Afrika menunjukkan bagaimana visi pembangunan terkait dengan keputusan untuk mengimplementasikan kebijakan populasi yang pada akhirnya bersifat politis. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Ghana Afrika sedangkan penelitian penulis berlokasi Kabupaten Rembang.

Penelitian kesepuluh yang ditulis oleh Tesfalem Tilahun Yemane, Getahun Gebre Bogale, Gudina Egata, dan Tilahun Kassa Tefera dengan judul *“Postpartum Family Planning Use and Its Determinants among Women of the Reproductive Age Group in Low-Income Countries of Sub-Saharan*

*Africa: A Systematic Review and Meta-Analysis*” metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *systematic review* dan *meta-analysis*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prevalensi penggunaan KB modern pasca persalinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di negara-negara berpenghasilan rendah di Afrika Sub-Sahara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kontrasepsi pasca persalinan masih rendah dan belum optimal dibandingkan dengan rekomendasi global pada postpartum keluarga berencana, padahal jika pemanfaatan tersebut dimaksimalkan hal ini dapat membantu mengurangi kematian ibu dan anak dan meningkatkan taraf hidup perempuan dan keluarganya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Afrika sedangkan penelitian penulis berlokasi Kabupaten Rembang.

### **1.6.2 Administrasi Publik**

Istilah “administrasi” memiliki akar etimologis kata Latin “*ad*” dan “*ministrare*”, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”. Dalam penggunaan modern, istilah ini mencakup berbagai arti, termasuk “memberikan bantuan,” “pemeliharaan,” “implementasi,” “kepemimpinan dan pemerintahan,” dan “manajemen”. Sebagaimana didefinisikan oleh Prajudi Atmosudirjo (Inu Kencana Syafie, 2010, hlm. 13), “administrasi” dipahami sebagai gejala sosial, khususnya yang terwujud dalam konteks masyarakat modern.

Keberadaan administrasi ini bergantung pada organisasi, yang menyiratkan bahwa administrasi tertanam dalam struktur organisasi. Oleh karena itu, untuk memastikan keberadaan administrasi dalam suatu masyarakat tertentu, perlu untuk mengidentifikasi organisasi yang masih beroperasi. Hal ini akan berfungsi sebagai titik acuan keberadaan administrasi.

Sebagaimana didefinisikan oleh Wirman Syafri (2012: 8), istilah "administrasi" dipahami sebagai kegiatan kolektif sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian ini dikemukakan oleh Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg, dan A. Thomson. Definisi ini diuraikan lebih lanjut oleh Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg, dan A. Thomson, yang mendefinisikan administrasi sebagai perilaku kerja sama sekelompok orang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Leonardo D. White (Wirman Syafri, 2012: 9), fungsi administrasi merupakan aspek yang melekat pada setiap usaha kolektif, terlepas dari asal usul atau skalanya Sondang Siagian (Wirman Syafri, 2012, hlm. 9) memberikan definisi administrasi sebagai suatu proses kerja sama yang menyeluruh, melibatkan dua orang atau lebih, diarahkan oleh maksud-maksud tertentu, dan ditujukan untuk mewujudkan hasil-hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Administrasi, sebagaimana didefinisikan oleh Dwight Waldo, memerlukan penerapan tindakan rasional yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan kerugian seminimal mungkin dan pencapaian hasil lain yang diantisipasi (Wirman Syafri, 2012, hlm. 10). Hal tersebut

memaparkan guna menjapai hasil yang diharapkan dengan mengecilkan potensi kerugian atau mengorbankan tujuan lain yang diharapkan.

sebagai didefinisikan sebagai "tindakan rasional kooperatif" atau "upaya kooperatif rasional. Intinya, tindakan rasional adalah"... tindakan yang diperhitungkan dengan benar untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan dengan kerugian minimum dan realisasi tujuan lain yang diinginkan." Ini menyiratkan bahwa tindakan tersebut direncanakan dengan cermat untuk mencapai hasil yang diinginkan tertentu sambil meminimalkan potensi kerugian atau mengorbankan tujuan lain yang diinginkan. Dwight memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai konsep ini, dengan mencatat bahwa "manusia dapat dan memang memaksimalkan pencapaian tujuan mereka dengan mengambil langkah maju, dengan menghubungkan sarana dengan tujuan secara tepat." Ini menyiratkan bahwa individu memiliki kapasitas untuk mengoptimalkan upaya mereka dalam mencapai tujuan dengan menyelaraskan sarana/upaya dan tujuan/hasil secara cermat.

Seperti yang dikemukakan oleh banyak ahli, istilah administrasi didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok individu dalam struktur organisasi, di mana mereka berkolaborasi secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan..

Sebagaimana didefinisikan oleh Scott M. Cutlip dan Allen H. Center, istilah "publik" mengacu pada sekelompok individu yang dipersatukan oleh kepentingan dan sentimen bersama, yang membentuk identitas kolektif berdasarkan tindakan kolektif mereka (Wirman Syafri, 2012: 15). Syafi'ie dkk. mendefinisikan publik sebagai sekelompok individu yang berbagi seperangkat

nilai dan norma, dan yang secara kolektif menganut seperangkat keyakinan, sikap, dan perilaku yang dianggap dapat diterima secara moral dan sosial (Harbani Pasolog, 2014: 6)..

Seperti yang dikemukakan oleh Nigro & Nigro (Yeremias T. Keban, 2008: 5), administrasi publik merupakan usaha kolektif yang dilakukan oleh para aktor dalam ruang publik, yang meliputi tiga cabang utama: yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ketiga cabang ini memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik, dan dengan demikian mengintegrasikannya ke dalam proses politik. Pendekatan ini berbeda secara signifikan dari metode yang digunakan dalam administrasi swasta dan terkait erat dengan banyak entitas swasta dan individu dalam penyediaan layanan masyarakat.

Sebagaimana didefinisikan oleh Edward H. Litchfield (Wirman Syafri, 2012: 25), administrasi publik adalah studi tentang organisasi, penempatan staf, pembiayaan, mobilisasi, dan kepemimpinan berbagai lembaga pemerintah.

Chandler dan Plano (Yeremias T. Keban, 2008 : 3) mendeskripsikan Administrasi publik didefinisikan sebagai proses di mana personel dan sumber daya publik diorganisasikan dan dikoordinasikan dengan tujuan merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan yang terkait dengan kebijakan publik. Menurut Chandler dan Plano berpendapat bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu yang tujuannya adalah pengelolaan urusan publik dan penyelesaian tugas yang diberikan. Tujuan administrasi publik sebagai disiplin ilmu adalah untuk mengatasi berbagai masalah publik melalui penerapan

perbaikan dan penyempurnaan, khususnya dalam domain organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Sejalan dengan pandangan ini, Woodrow Wilson (Wirman Syafri, 2012: 21) berpendapat bahwa administrasi publik merupakan kerangka kerja organisasi dan operasional yang di dalamnya fungsi-fungsi pemerintahan dijalankan. Dasar pemikiran yang mendasarinya adalah tujuan mendasar pemerintah untuk memfasilitasi pemenuhan tanggung jawab publik dengan cara yang hemat biaya, dan, jika memungkinkan, sejalan dengan preferensi dan aspirasi masyarakat. Melalui pelaksanaan administrasi publik, pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi melalui inisiatif yang dipimpin oleh swasta..

Rosenbloom (Yeremias T. Keban, 2008: 6) mendefinisikan administrasi publik sebagai penerapan teori dan proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga memungkinkan penyampaian fungsi pengaturan dan pelayanan bagi masyarakat secara keseluruhan atau sebagian..

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa administrasi publik adalah proses kolaborasi antara entitas pemerintah, institusi, dan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah publik melalui perumusan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Realisasi kebijakan publik yang efektif dan efisien memerlukan pengembangan praktik manajemen yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### 1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Evolusi bidang ilmiah dapat ditelusuri kembali ke pergeseran paradigma yang mendasarinya. Paradigma dapat didefinisikan sebagai pemahaman bersama komunitas ilmuwan tentang cara mendekati suatu masalah, termasuk nilai-nilai, metode, prinsip-prinsip dasar, dan cara-cara pemecahan masalah mereka. Seperti yang diutarakan oleh Kuhn (Yeremias T. Keban, 2008: 31), paradigma bersifat dinamis dan berkembang seiring waktu. Pergeseran perspektif ini pasti akan memunculkan krisis atau anomali. Sepanjang evolusi ilmu administrasi publik, krisis semacam itu telah terjadi dalam berbagai kesempatan. Krisis-krisis tersebut dapat diamati dalam transisi dari perspektif tradisional ke perspektif kontemporer, seperti yang diutarakan oleh Nicholas Henry (Yeremias T. Keban, 2008: 31). Dalam analisisnya, Beliau menguraikan lima kerangka paradigmatik yang berbeda dalam bidang administrasi negara. Kelima paradigma tersebut adalah sebagai berikut :

Paradigma 1 (1900-1920), yang juga dikenal sebagai dikotomi politik dan administrasi, dibentuk oleh kontribusi Frank J. Goodnow dan Leonard D. White, namun paradigma ini telah dikritik karena fokusnya yang sempit pada birokrasi pemerintah, tanpa penggambaran yang jelas tentang metode yang diinginkan untuk administrasi publik.

Paradigma 2, yang muncul antara tahun 1927 dan 1937, dikenal sebagai Paradigma Prinsip-prinsip Administratif. Tokoh-tokoh utamanya meliputi Willoughby, Guillick, Urwick, Fayol, dan Taylor. Meskipun fokus paradigma ini adalah administrasi publik, lokasi pasti kemunculannya masih belum pasti.

Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik paling baik dicontohkan oleh pendekatan Paradigma 3 (1950-1970). Paradigma ini menghadirkan dua persepsi yang kontras mengenai administrasi yang bebas nilai, di satu sisi, dan di sisi lain, persepsi mengenai politik yang sarat nilai. Pada penerapannya, bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik yang memiliki lokus pada pemerintah pada paradigma yang baru.

Paradigma 4 (1956-1970) merupakan pergeseran perspektif dalam bidang administrasi publik, di mana fokus bergeser dari pendekatan yang terutama bersifat praktis ke pendekatan yang lebih ilmiah dan analitis. Paradigma ini menekankan pengembangan prinsip-prinsip manajemen melalui proses ilmiah yang sistematis dan mendalam. Fokus dari perspektif ini sebagai lokus karena semua fokus diasumsikan bisa diterapkan pada public atau swasta.

Paradigma 5 tahun 1970, berjudul "Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik," menyajikan penggambaran yang jelas tentang fokus dan tempatnya. Fokusnya adalah pada teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan tempatnya adalah pada isu-isu kepentingan publik..

Dengan mempertimbangkan evolusi ilmu administrasi publik, dapat diamati bahwa paradigma baru telah muncul sesuai dengan kemajuan sosial-ekonomi-politik masyarakat di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang di mana negara dan pemerintah memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Paradigma ini dikenal dengan paradigma Good Governance, dan merupakan pergeseran dari model-model sebelumnya yang memberikan penekanan dominan pada peran negara. Sebaliknya, paradigma



*Good Governance* menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Dwipayana dan Eko (Syahrani dan Syakrani, 2009: 122) berpendapat bahwa tata kelola merupakan konsep yang netral yang darinya dapat dirumuskan model yang baik. Hal ini mengakibatkan munculnya istilah "*good governance*". Sebaliknya, model yang tidak sehat (atau buruk/tercela) juga dapat dirumuskan, sehingga muncul istilah "tata Kelola pemerintah yang buruk".

Pemahaman konvensional tentang tata kelola dapat ditelusuri kembali ke Bank Dunia, yang mendefinisikannya sebagai *governance as the manner in which power is exercised in management of a country's economic and social resources for development* (Syahrani dan Syakrani, 2009, hlm. 121).

Robert Charlick berpendapat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mencakup pengelolaan yang efektif dari semua bentuk urusan publik melalui perumusan peraturan dan/atau kebijakan yang sah yang dirancang untuk memajukan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, Pierre Landell-Mills dan Ismael Seregeldin mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pelaksanaan otoritas dan kekuasaan politik untuk tujuan mengelola sumber daya bagi pembangunan sosial-ekonomi (Santosa, Panji. 2009: 130).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, terdapat tiga pilar utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat didefinisikan sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung

jawab untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterima oleh seluruh masyarakat.

UNDP mengemukakan karakteristik atau prinsip yang harus dianut dalam *good governance* (Anggara, Sahya. 2016 : 210), meliputi:

1. Partisipasi merupakan hak dasar setiap orang atau warga negara, yang mencakup kapasitas untuk memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.
2. Aturan hukum, serta kerangka hukum dan perundang-undangan, harus adil, ditegakkan, dan dipatuhi secara menyeluruh.
3. Transparansi (*transparency*), Konsep transparansi harus diintegrasikan ke dalam kerangka kerja yang lebih luas dari arus informasi bebas.
4. Daya tanggap (*responsiveness*), sangat penting bahwa semua lembaga dan proses penyusunnya berorientasi pada penyediaan layanan kepada berbagai pemangku kepentingan.
5. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*), tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi pada tercapainya konsensus, berfungsi sebagai mediator antara berbagai kepentingan yang terlibat untuk memfasilitasi konsensus atau peluang optimal bagi kepentingan masing-masing pihak..
6. Berkeadilan (*equity*), penerapan kebijakan yang adil dan promosi pemerintahan yang baik akan memfasilitasi terciptanya lingkungan yang

menawarkan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat, dengan tujuan meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup mereka..

7. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), Tujuan utama dari setiap proses, kegiatan, atau lembaga adalah menghasilkan sesuatu yang selaras dengan kebutuhan pemangku kepentingan terkait yang telah diidentifikasi. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
8. Akuntabilitas (*accountability*), Mereka yang menduduki posisi berwenang di organisasi publik, masyarakat, dan swasta sipil harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, yang harus dibuat transparan kepada publik dan para pemangku kepentingan.
9. Visi strategis, bersama dengan para pemimpin dan anggota masyarakat, menggunakan perspektif yang komprehensif dan jangka panjang tentang pengembangan manusia. Hal ini dicapai dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah, kompleksitas sosial dan budaya, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi pada sifat multifaset dari keberadaan manusia.
10. Saling keterbukaan (*interrelated*), Dapat dilihat bahwa semua karakteristik pemerintahan yang baik saling memperkuat dan saling terkait, dan dengan demikian tidak dapat dianggap terpisah.

#### **1.6.4. Manajemen Publik**

Pada sebuah organisasi, manajemen merupakan fungsi yang diperlukan untuk memperlancar proses organisasi dan mencapai tujuannya. Dalam instansi

pemerintah, khususnya dalam konteks pelayanan publik, manajemen yang efektif dan efisien sangat penting untuk menyelenggarakan pelayanan dengan cara yang memperkuat dan menghubungkan tujuan pelayanan itu sendiri, yaitu kepuasan publik, dan memastikan bahwa keduanya tidak dapat berdiri sendiri.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota suatu organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Handoko, 2009:23).

Manajemen adalah seni dan ilmu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengatur, dan mengawasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Manulang, dalam Atik & Ratminto, 2012:1).

Menurut Stoner dan Freeman (dalam Safroni, 2012:44) Manajemen adalah tentang memastikan semua orang memiliki tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen adalah tentang perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk memastikan kita semua bekerja menuju tujuan yang sama..

Pada karyanya tahun 2009, Hasibuan (2009:26) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses khas yang meliputi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian tindakan yang dilakukan untuk memastikan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pengertian manajemen publik pada prinsipnya merupakan manajemen instansi pemerintahan. Pendapat Overman dalam Keban (2004:85) yang dikutip oleh Harbani Pasolong (2014:83), mengutarakan jika Manajemen publik bukan “*scientific management*”, walaupun sangatlah terpengaruh oleh “*scientific management*”. Penting untuk dipahami bahwa manajemen bukanlah analisis kebijakan atau administrasi publik. Perbedaan ini penting karena mencerminkan ketegangan yang melekat antara dua pendekatan yang berbeda: orientasi “instrumental rasional” dan arah kebijakan politik. Manajemen publik adalah bidang studi interdisipliner yang mencakup pemeriksaan berbagai elemen organisasi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan, dengan fokus khusus pada pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, politik, informasi, dan fisik.

Definisi manajemen publik sebagaimana dikemukakan para ahli yang dikutip di sini bergantung pada latar belakang pendidikan, pengalaman, dan perspektif yang dianut masing-masing. Istilah “manajemen publik” didefinisikan dengan berbagai cara oleh para ahli. Misalnya, Nor Ghofur (2014) mendefinisikan manajemen publik sebagai “manajemen pemerintahan,” yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian layanan bagi masyarakat.

Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Overman dalam Keban (2004:85)

mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “*scientific management*”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “*scientific manajemen*”.

Fungsi manajemen adalah komponen fundamental yang secara universal ada dan intrinsik dalam proses manajemen, yang berfungsi sebagai titik acuan bagi para manajer dalam pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, terdapat keragaman perspektif tentang peran dan tanggung jawab spesifik yang terkait dengan fungsi-fungsi manajemen di antara berbagai ahli di bidang ini.

Seperti yang dikemukakan oleh Henry Fayol (Safroni, 2012:179), fungsi penting manajemen dapat diringkas menjadi lima kategori berikut: perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian.

Seperti yang dikemukakan oleh Ricki W. Griffin dalam Safroni (2012:44), fungsi manajemen dapat digambarkan sebagai berikut: perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut ahli Henry Fayol adalah sebagai berikut :

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan, sebab pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian suatu kegiatan harus diawali dengan suatu proses perencanaan yang matang dan sistematis..

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, mengelompokkan tugas, dan mendistribusikan pekerjaan kepada setiap karyawan. Proses ini juga melibatkan penentuan departemen (*subsistem*) dan penentuan hubungan.

c) Pengarahan (*Commanding*)

Fungsi pengarahan merupakan fungsi yang dapat diterapkan setelah penyusunan rencana, organisasi, dan karyawan. Setelah fungsi ini diterapkan, proses manajemen untuk mencapai tujuan dapat dimulai.

d) Pengkoordinasian (*Coordinating*)

Setelah manajer mendistribusikan wewenang dan menugaskan tugas kepada karyawan, tahap selanjutnya adalah koordinasi. Mengingat bahwa setiap bawahan hanya bertanggung jawab atas sebagian dari keseluruhan beban kerja perusahaan, penting untuk memastikan bahwa kontribusi masing-masing bawahan selaras, terintegrasi, dan diarahkan dengan cara yang memudahkan pencapaian tujuan organisasi..

### **1.6.5 Efektivitas Program**

Pada KBBI makna efektif berarti manjur, mujarab, memiliki efek, haril berguna. James L. Gibson, dalam bukunya Harbani Pasolong (2010, hlm. 4), menawarkan definisi yang indah tentang efektivitas yaitu pencapaian sasaran.

Sedarmayanti mendefinisikan konsep efektivitas sebagai ukuran seberapa jauh target yang akan dicapai. Subkhi dan Jauhar mengartikan efektivitas yaitu

hubungan antara output dan tujuan. Efektivitas merupakan kemampuan dalam mencapai target tujuan dan sasaran yang diraih oleh seseorang maupun organisasi. Efektivitas memiliki arti pemanfaatan segala sumber daya yang tersedia guna mencapai hasil yang optimal (Najidah & Lestari, 2019:5).

Sebagaimana dikemukakan oleh Georgopolous dan Tannembaum (dalam Winasis & Setyawan, 2016:13), efektivitas bergantung pada kemampuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain menetapkan target tersebut, organisasi juga harus memiliki kapasitas untuk mempertahankan posisinya dalam mencapai target tersebut.

Sebagaimana ditegaskan Jibril (2017:3), konsep efektivitas bergantung pada hasil atau keluaran dari suatu program atau kegiatan. Supaya mampu dikatakan berpengaruh, pelaksanaan program atau kegiatan tersebut harus dapat dibuktikan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperlihatkan ketepatan antara sasaran yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh melalui ketepatan harapan, implementasi program, serta pencapaian hasil kegiatan.

Efektivitas program bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi melalui serangkaian kegiatan. Para pembuat kebijakan harus mampu memahami bagaimana tingkat efektivitas dijalankannya suatu program, sehingga akan mampu mempertimbangkannya untuk kemudian diimplementasikan. Harapannya, informasi terkait dengan efektivitas kebijakan dapat berdampak besar kepada implementasi kebijakan



dengan karakteristik kebijakan sebelumnya (Nicholson-Crotty & Carley, 2016:79).

Pandangan efektivitas menjadi bagian yang penting bagi para actor yang turut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik untuk menetapkan sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu masyarakat tidak mungkin mempercayai suatu kebijakan yang tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan publik. Kebijakan yang dianggap efektif dilihat dapat menarik perhatian dari sumber politik dan administrasi yang efektif, sedangkan kebijakan yang tidak efektif seringkali mengalami kegagalan. Sebagian analisis percaya bahwa efektivitas sebagai pengukur kebijakan melalui perbandingan antara tujuan dengan hasil yang dicapai (Lubell, 2003:311).

Program-program yang tidak dijalankan secara efektif, bagaimanapun tetap perlu dilakukan pemeriksaan kembali dengan melihat dua aspek. Pertama, ketidakefektifan program tersebut kemungkinan disebabkan oleh struktural, sumber daya, ataupun isu-isu kebenaran yang mudah diperbaiki. Dalam hal ini, jika dilakukan penarikan dukungan mungkin dapat menghentikan program yang berpotensi menjanjikan saat masih berjalan. Kedua, program yang tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuan mungkin mempunyai struktur penting dalam masyarakat atau struktur komando yang sebelumnya tidak ditujukan langsung dalam desain program (Martin et al., 2014:15-16).

Hal serupa dengan penjelasan diatas disampaikan oleh Starawaji (2009) yang mengungkapkan bahwa efektivitas mengindikasikan taraf terjadinya tujuan, sehingga efektivitas didefinisikan sebagai pengaruh yang timbul karena

suatu aktifitas guna mengetahui dan mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan yang sudah dicapai dalam tindakan yang dilakukan.

Kemanjuran suatu program bergantung pada kemampuannya untuk mencapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan dalam konteks lingkungan operasional sektor publik tertentu. Dalam konteks ini, suatu program sektor publik dapat dianggap efektif jika mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap populasi yang dilayaninya dan memberikan layanan yang sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam menjalankan suatu program, organisasi tentunya ingin mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, namun memang dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar yang secara umumnya dapat dikatakan tidak efektif seperti pada penjelasan diatas. Keberhasilan implementasi program dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, yang sering disebut sebagai kendala. Kendala ini dapat didefinisikan sebagai elemen yang menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui implementasi program tertentu. Sebagai contoh nyata dari kendala yaitu pada sebuah rantai dengan penghubung yang lemah yang berada didalam suatu sistem kompleks pada suatu waktu, maka sering terjadi salah satu unsur dalam sistem akan membatasi kesanggupannya untuk mewujudkan tercapainya tujuan. Maka dari itu akan timbul usaha – usaha yang difokuskan pada masalah, sehingga dapat menciptakan dan memaksimalkan terbentuknya inisiatif agar sistem yang mengalami kendala dapat melakukan kemajuan yang signifikan. Guna mencapai kemajuan diperlukan usaha awal dengan mengidentifikasi hambatan – hambatan yang ada dan memperbaiki keseluruhan sistem yang ada.

Jenis – jenis kendala sangatlah beragam, seperti yang dikemukakan oleh Mowen dan Hansen yang membagi jenis – jenis kendala kedalam 2 kategori yaitu :

1) Kendala berdasarkan asalnya, dibagi menjadi 2 yaitu :

a. *Internal Constraint* yang artinya asal kendala yang membatasi organisasi dalam menjalankan program berasal dari dalam organisasi itu sendiri, seperti contohnya adanya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam melaksanakan inovasi program organisasi. Internal constraint harus dikenali oleh organisasi dan dimanfaatkan dengan maksimal untuk menaikkan output organisasi.

b. *External Constraint* yang artinya asal kendala yang membatasi organisasi dalam menjalankan program berasal dari luar organisasi, seperti contohnya terbatasnya jaringan organisasi untuk melaksanakan programnya. Solusi dari external constraint menyesuaikan dengan kendala yang dihadapi oleh organisasi

2) Kendala berdasarkan sifatnya

a. *Binding constraint* yang artinya kendala organisasi terdapat pada sumber daya yang telah digunakan organisasi secara keseluruhan

b. *Loose constraint* yang artinya kendala organisasi terdapat pada sumber daya yang digunakan hanya sebagian atau separuh dari total keseluruhan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Selain jenis – jenis kendala seperti pada penjelasan diatas, terdapat dua jenis kendala yang dikemukakan oleh (Fogarty, 1991) yaitu :

1. Kendala fisik, merupakan kendala yang berhubungan dengan kapasitas peralatan yang digunakan oleh organisasi
2. Kendala non fisik merupakan kendala berupa permintaan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan oleh organisasi.

Budiani (2007, 53) berpendapat bahwa keberhasilan suatu program dapat diukur dengan menggunakan variabel-variabel berikut:

1. Ketepatan sasaran program

Mengenai sejauh mana peserta program memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

Berhubungan dengan kapasitas penyelenggara program dalam menyebarkan penjelasan terkait implementasi program kepada masyarakat umum dan peserta program sasaran,.

3. Tujuan program

Tingkat kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang ditetapkan sebelumnya dapat dievaluasi.

4. Pemantuan program

Dari segi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pasca pelaksanaan program, hal ini dapat dilihat sebagai bentuk perhatian yang ditujukan kepada para peserta program.

Sutrisno (2007) mendefinisikan efektivitas program sebagai penilaian atau pengukuran sejauh mana kegiatan dalam program mencapai tujuan awalnya.

Keberhasilan suatu program terlihat dari kemampuannya mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait. Indikator Efektivitas menurut Sutrisno (2007) yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Program.

pemahaman terhadap program yang dimaksud adalah bagaimana suatu program dioperasionalkan sedemikian rupa sehingga mudah diterima dan dipahami. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program berjalan secara optimal dan efektif selama fase implementasi. Semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konsep ini.

2. Ketepatan Sasaran.

Sasaran yang dibahas dalam indikator ini adalah sasaran yang memerlukan tinjauan langsung terkait keberadaan program. Karena keberadaan program sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka suatu program dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan di awal.

3. Ketepatan Waktu.

Waktu merupakan elemen penting dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam konteks ini, tujuannya adalah untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan/program tersebut efektif, sejauh mana implementasi dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, semakin tepat waktu pelaksanaan program, maka semakin efektif pula program tersebut dapat direalisasikan.

#### 4. Tercapainya Tujuan

Indikator ini mengukur keberhasilan suatu program dengan menilai sejauh mana tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai.

#### 5. Perubahan Nyata.

Tujuan akhir adalah untuk menilai keberhasilan program dengan mengukur sejauh mana perubahan yang terjadi. Diharapkan bahwa aturan yang ditetapkan di awal akan diterapkan secara efektif sesuai dengan jadwal yang direncanakan..

Mampu ditarik benang merah bahwa guna mencapai hasil yang telah diharapkan perlu adanya tindakan. Selanjutnya, dilakukan penentuan apakah kelima indikator keberhasilan tersebut selaras dengan tujuan program. Jika keselarasan tersebut terlihat jelas, program tersebut dianggap berhasil. Maka dari itu untuk mengetahui efektivitas program Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam peningkatan kepedulian masyarakat menggunakan alat kontrasepsi di Kabupaten Rembang, peneliti menggunakan teori efektivitas program dari Sutrisno. Selain itu penulis menyimpulkan bahwa teori efektivitas program dari Sutrisno cocok untuk mengukur efektivitas program Keluarga Berencana karena:

1. Sangatlah penting untuk memastikan implementasi program yang efektif guna menjamin fungsi optimalnya dan untuk memfasilitasi pemahaman yang komprehensif terhadap tujuannya, yang sangat penting bagi keberhasilan operasinya;

2. Sangat penting bahwa tujuan yang ingin dicapai selaras dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga menjamin terlaksananya program secara efektif;
3. Keberhasilan suatu program bergantung pada keselarasannya dengan agenda yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan secara masuk akal bahwa derajat ketepatan yang melekat dalam suatu program berkorelasi langsung dengan efektivitas keseluruhannya;
4. Apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut;
5. Keberhasilan suatu program dapat diukur dari kapasitasnya untuk memberikan hasil nyata dan langsung bagi populasi sasaran yang ditunjuk.

#### **1.6.7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program**

Sebuah organisasi akan beroperasi secara terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan memberikan motivasi bagi pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi memberikan arah dengan menggambarkan kondisi masa depan yang secara konsisten dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur suatu organisasi dapat mempengaruhi efektivitasnya karena adanya pengaruh dari elemen-elemen struktur yang mengatur operasinya. Struktur yang dibangun dengan baik adalah struktur yang memiliki fungsi lengkap dan desain yang lugas. Keterlibatan dan dukungan dari pihak-pihak terkait, serta keselarasan dengan sistem nilai yang ada, juga penting untuk dipastikan jika kita ingin mencapai struktur organisasi yang efektif. Sangat penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang memengaruhi jika tujuannya adalah untuk mewujudkan struktur yang efektif.

Richard M Steers (1995:86) dalam buku karya Khaerul Umam (2012:351) menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

#### 1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi ditentukan oleh hubungan yang relatif tetap, seperti komposisi sumber daya manusianya. Di sisi lain, struktur merupakan metode unik untuk mengatur manusia dalam suatu organisasi. Dalam konteks ini, individu berada dalam hubungan yang relatif stabil, yang pada gilirannya memunculkan pola interaksi dan perilaku yang berorientasi tugas.

#### 2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan dapat dibagi menjadi dua aspek yang berbeda. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal, yang meliputi faktor-faktor eksternal yang berada di luar batas-batas organisasi dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap organisasi, khususnya dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal, yang juga dikenal sebagai iklim organisasi, yang mewakili lingkungan kolektif dalam organisasi.

#### 3. Karakteristik Pekerja

Faktor paling signifikan yang memengaruhi efektivitas adalah karakteristik individu dari tenaga kerja. Mengingat adanya keberagaman yang melekat dalam tenaga kerja, penting bagi setiap individu untuk menyadari atribut unik mereka guna menyelaraskan tujuan pribadi mereka



dengan tujuan organisasi. Memadukan tujuan individu dan organisasi adalah kunci agar organisasi berhasil.

#### 4. Karakteristik Manajemen

Manajemen adalah serangkaian teknik dan proses yang dirancang untuk memengaruhi perilaku semua elemen dalam suatu organisasi, guna memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif. Kebijakan dan praktik manajemen menyediakan perangkat bagi para pemimpin untuk mengarahkan semua kegiatan dengan cara yang memajukan tujuan organisasi. Penerapan kebijakan dan praktik manajemen sangat penting untuk mempertimbangkan unsur manusia, bukan hanya berfokus pada strategi dan mekanisme kerja. Hal ini mencakup perumusan tujuan strategis, identifikasi dan pemanfaatan sumber daya, pembentukan lingkungan yang mendukung pencapaian, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan inovasi organisasi..

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori faktor yang mempengaruhi efektivitas oleh Richard M Steers. Teori tersebut tepat untuk penelitian ini karena dari perspektif tersebut ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Bagian-bagian penyusun suatu organisasi saling berkaitan erat, sehingga kekurangan apa pun pada satu area pasti akan memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan;
- b. Efektivitas pendekatan apa pun bergantung pada tingkat kesadaran dan kualitas interaksi dengan lingkungan sekitar;

- c. Kemampuan suatu organisasi untuk bertahan dan berkembang bergantung pada kapasitasnya untuk terus memperbarui sumber daya. Kegagalan mempertimbangkan dampak faktor eksternal terhadap efektivitas organisasi pasti akan mengakibatkan tantangan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebaliknya, organisasi yang secara proaktif menangani pengaruh faktor eksternal ini berada pada posisi yang lebih baik untuk mencapai tujuannya.

#### **1.6.8. Program Keluarga Berencana**

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu layanan kesehatan preventif yang paling mendasar dan penting bagi wanita, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat morbiditas dan mortalitas ibu yang terkait dengan kehamilan. Sebagian besar wanita mengalami kesulitan dalam menentukan metode kontrasepsi yang paling tepat (Saifudin, 2006). Akseptor Keluarga Berencana (KB) adalah peserta keluarga yang pasangan usia muda dimana salah satu dari mereka menggunakan alat kontrasepsi dengan tujuan untuk mencegah kehamilan, baik melalui program KB maupun non program. Akseptor Keluarga Berencana (KB) adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat kontrasepsi (Pinem, 2009). Kontrasepsi merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mengatur angka kelahiran dalam konteks keluarga berencana. Ini mencakup berbagai metode, termasuk teknik alami, prosedur sterilisasi, dan strategi yang dirancang untuk menghambat proses pembuahan (Pinem, 2009).

Tujuan utama dari Keluarga Berencana (KB) adalah untuk mendorong pembentukan keluarga-keluarga kecil yang sesuai dengan kemampuan sosio-ekonomi suatu unit keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan yang dikemukakan oleh Alex Inkeles dan David Smith, yang menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya sekedar penyaluran modal dan teknologi, tetapi juga membutuhkan kapasitas untuk mengolah sumber daya yang berorientasi pada kebutuhan saat ini dan masa depan (Sulistiyawati, 2012).

Program keluarga berencana nasional merupakan investasi jangka panjang, dan karenanya tidak masuk akal untuk mengharapkan hasil langsung, baik positif maupun negatif. Keberhasilan atau kegagalan program memiliki dampak signifikan pada nilai manfaat yang diperoleh dari keberhasilan pembangunan lainnya (Sulistiyawati, 2011). Program Keluarga Berencana (KB) nasional dirancang untuk mengurangi tingkat kesuburan dengan menyediakan peralatan, layanan, dan informasi kontrasepsi. Dasar pemikiran yang mendasari program ini adalah bahwa pasangan usia subur (PUS) yang ingin membatasi jumlah anggota keluarganya, dalam jangka waktu tertentu, akan menurunkan angka kelahiran rata-rata. Topik program keluarga berencana biasanya didekati dari perspektif hak orang tua untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka (Remi & Hadiyanto, 2018).

#### 1. Sasaran Program KB

Tujuan dari keluarga berencana adalah untuk mencapai dua kelompok yang berbeda: langsung dan tidak langsung. Kelompok sasaran langsung terdiri dari pasangan usia subur yang ingin mengurangi angka kelahiran melalui

penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten. Sasaran tidak langsung adalah pelaksana dan program yang dirancang untuk memfasilitasi keluarga berencana. Upaya ini ditujukan untuk mengurangi angka fertilitas melalui penerapan kebijakan kependudukan terpadu, dengan tujuan akhir untuk mendorong pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera (DJA, 2015:13)

## 2. Metode Kontrasepsi

Pelaksanaan program keluarga berencana bergantung pada kesadaran dan kemauan masyarakat. Hal tersebut tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan keluarga berencana. Pelaksanaan program keluarga berencana dilakukan melalui penggunaan alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya proses pembuahan dan kehamilan berikutnya. Metode kontrasepsi diklasifikasikan ke dalam 15 kategori, yang secara umum didefinisikan sebagai “mekanis dan kimiawi”. Kategori-kategori ini juga mencakup metode alami dan sterilisasi. Metode alami adalah metode yang tidak melibatkan penggunaan alat kontrasepsi dan dapat dilakukan tanpa intervensi dari luar. Contoh metode alami termasuk hubungan seksual terputus, pantang berkala, dan puasa total. Sebaliknya, metode kontrasepsi yang menggunakan alat bantu eksternal, seperti obat-obatan, perangkat, dan zat lainnya, dikelompokkan di bawah istilah umum “kimiawi dan mekanis.” Kategori ini mencakup pil kontrasepsi, suntikan, kondom, IUD, implan, diafragma, semprotan, spermisida, dan prosedur sterilisasi.

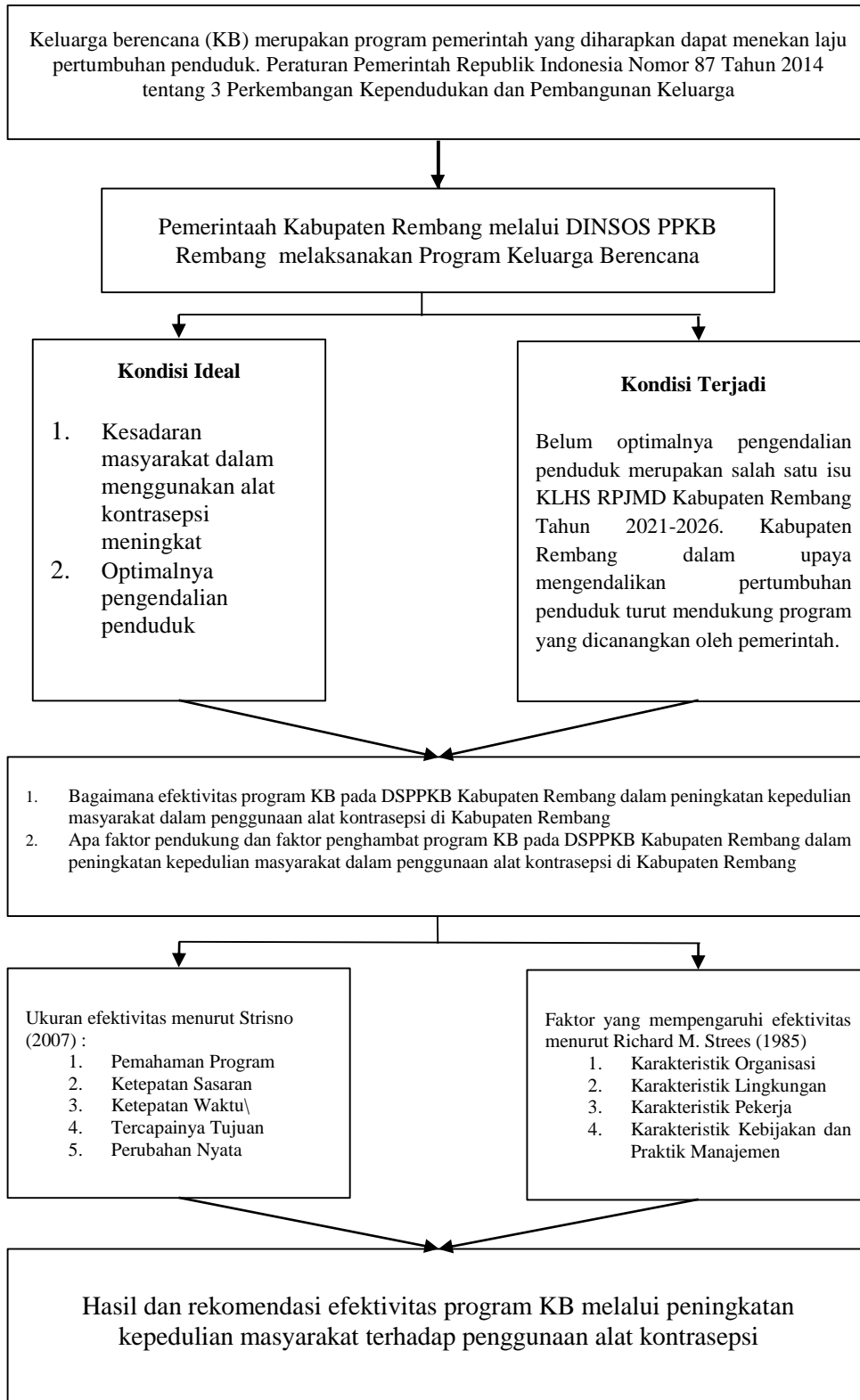
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana merupakan usaha sadar masyarakat untuk menekan angka kelahiran. Hal ini dicapai melalui penerapan tindakan pencegahan dan pembatasan kehamilan melalui penggunaan metode kontrasepsi, dengan tujuan akhir tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam program Keluarga Berencana (Wardani, 2010:46)

### 3. Pasangan Usia Subur

Pasangan usia subur didefinisikan sebagai pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15 dan 49 tahun. Kelompok demografi ini dianggap subur karena kemungkinan melakukan hubungan seksual dan potensi kehamilan akibat aktivitas tersebut. Diharapkan bahwa PUS pada akhirnya akan menjadi peserta aktif dalam keluarga berencana, dengan tujuan akhir untuk secara langsung memengaruhi tingkat kesuburan. Rentang usia 15-49 tahun dianggap subur bagi wanita, karena pada periode ini kemungkinan melahirkan paling tinggi. Wanita dalam rentang usia ini disebut sebagai wanita subur (WUS), dan jika mereka menikah, mereka disebut sebagai pasangan subur (PUS) (Pasrah, dkk., 2014:6).

## 1.6.9 Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penelitian



## **1.7 Operasionalisasi Konsep**

Dalam menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu bagaimana Bagaimana efektifitas program Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dalam pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Rembang? Dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rembang?

### **1. Efektivitas Program KB**

Program Keluarga Berencana didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dengan mempromosikan usia legal untuk menikah, akses terhadap alat kontrasepsi, inisiatif pengembangan keluarga, dan perluasan program kesejahteraan keluarga, dengan tujuan akhir untuk mendorong terbentuknya keluarga kecil, bahagia, dan stabil secara ekonomi. Indikator efektivitas program kb antara lain:

#### **a. Pemahaman Program**

- 1) Pihak yang terlibat dalam Program Keluarga Berencana bisa memahami dengan baik mengenai program yang dijalankan. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang memahami latar belakang Program Keluarga Berencana.
- 2) Tingkat pengetahuan masyarakat tentang program Keluarga Berencana dan alat kontrasepsi sangat penting. Program yang efektif

harus menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang manfaat KB serta risiko dan efek samping dari metode kontrasepsi yang berbeda.

b. Ketepatan Sasaran

- 1) Ketepatan sasaran adalah pelaksanaan Program Keluarga Berencana oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang mampu memprioritaskan masyarakat khususnya pasangan usia subur di Kabupaten Rembang yang diikutsertakan ke dalam program yang sesuai dengan aturan dan ketentuan awal.
- 2) Ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana penting guna untuk memastikan bahwa program KB sudah efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi setiap peserta program KB atau pasangan usia subur di Kabupaten Rembang sehingga program sejalan dengan kepentingan pemerintah.

c. Ketepatan Waktu

- 1) Ketepatan waktu adalah Program Keluarga Berencana mampu dilaksanakan sesuai dengan standar operasional waktu yang ditetapkan. Agar pelaksanaan Program Keluarga Berencana tidak terlambat atau mengalami hambatan, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Keluarga Berencana telah memiliki standar operasional kerja yang disusun sebaik mungkin.



2) Ketepatan waktu dalam proses kegiatan sangat penting, ketepatan waktu dalam realisasi program Keluarga Berencana oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Keluarga Berencana dapat dikatakan efektif juga dilihat dari ketepatan pelaksanaannya. Jika program keluarga berencana dijalankan semakin tepat waktu maka semakin efektif program terealisasi.

d. Tercapainya Tujuan

1) Tercapainya tujuan adalah mengetahui tujuan Program Keluarga Berencana sudah tercapai dengan baik selama program terlaksana. Penelitian ini akan mengetahui upaya-upaya pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana.

2) Tercapainya tujuan adalah mengetahui program keluarga berencana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dapat dikatakan sudah tercapai dapat dilihat dari upaya-upaya meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam mendukung program keluarga berencana.

e. Perubahan nyata

1) Perubahan nyata dalam program Keluarga Berencana adalah dengan meningkatkannya kepedulian masyarakat di Kabupaten Rembang

terhadap pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi pertumbuhan penduduk yang juga menjadi fokus utama pemerintah.

- 2) Perubahan nyata mengenai bagaimana program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang meninggalkan perubahan yang nyata dilihat dari kesadaran masyarakat untuk memiliki tidak lebih dari 2 anak dapat dikatakan efektif dalam merealisasikan program.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program KB**

Efektivitas program Keluarga Berencana pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang upaya peningkatan kepedulian masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi di Kabupaten Rembang dapat dikatakan berhasil karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan program, antara lain;

### **A. Faktor Pendukung**

#### **a. Karakteristik Organisasi**

- 1) Karakteristik organisasi adalah mengetahui struktur organisasi serta menempatkan susunan sumber daya manusia yang tepat dalam pelaksanaan program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
- 2) Karakteristik Organisasi adalah mengetahui bagaimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merealisasikan program Keluarga Berencana yang jelas dan terdefinisi dengan baik, yang selaras dengan visi dan misi organisasi yang ingin dijalankan.

- 3) Karakteristik Organisasi adalah memahami struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Rembang dalam menempatkan sumber daya yang tepat pada pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

b. Karakteristik Pekerja

- 1) Karakteristik Pekerja adalah mengetahui sikap dan komitmen para pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam mempraktikkan tugas dan fungsinya selama program berlangsung.
- 2) Karakteristik pekerja adalah mengetahui bagaimana motivasi dan dorongan dari pemimpin kepada pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang agar para pegawai dapat bekerja dan berkontribusi dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Rembang secara maksimal.

B. Faktor Penghambat

a. Karakteristik Lingkungan

- 1) Karakteristik lingkungan adalah mengetahui hal-hal yang ada pada lingkungan internal dan eksternal Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang yang dapat mengganggu atau menghambat keberhasilan Program Keluarga Berencana.
- 2) Karakteristik lingkungan yang dapat mendorong keberhasilan program Keluarga Berencana yaitu komunikasi yang terbuka antara

berbagai tingkatan dan divisi dalam Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang merupakan kunci keberhasilan. Hal ini memastikan informasi terkini dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam program Keluarga Berencana.

b. Karakteristik Kebijakan dan Praktik Manajemen

- 1) Karakteristik kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat yang digunakan untuk mengarahkan tujuan program Keluarga Berencana serta penyesuaian pada perubahan lingkungan inovasi organisasi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang guna untuk mencapai tujuan program Keluarga Berencana di Kabupaten Rembang.
- 2) Karakteristik Kebijakan dan Praktik Manajemen adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang direalisasikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang sudah sesuai kebijakan dan prakteknya dengan sistem manajemen agar menunjang keberhasilan program.

## **1.8 Argumen Penelitian**

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia memiliki latar belakang yang cukup kompleks dan bervariasi seiring dengan perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa poin latar belakang program KB di Indonesia:

1. **Kepadatan Penduduk:** Salah satu latar belakang utama adalah masalah kepadatan penduduk. Pada masa awal program KB di Indonesia, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi perhatian utama karena potensi dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
2. **Tujuan Pembangunan:** Program KB di Indonesia juga diinisiasi sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengendalian pertumbuhan penduduk untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. **Kesehatan Reproduksi:** Latar belakang lainnya adalah masalah kesehatan reproduksi. Program KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan reproduksi.
4. **Isu Sosial dan Ekonomi:** Ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, kesenjangan sosial, dan ketimpangan gender juga menjadi latar belakang penting bagi program KB. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban sosial dan ekonomi yang ditanggung oleh keluarga, terutama yang berpenghasilan rendah.
5. **Agenda Kesejahteraan Keluarga:** Program KB juga dipandang sebagai bagian dari agenda kesejahteraan keluarga. Dengan memberikan pendidikan dan akses yang lebih baik terhadap metode kontrasepsi, diharapkan keluarga dapat merencanakan kehamilan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka.

6. Dukungan Internasional: Pada beberapa periode, program KB di Indonesia juga didukung oleh organisasi internasional, seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bekerja sama dengan Badan PBB dan lembaga donor internasional untuk menyediakan dana, teknologi, dan bantuan lainnya.
7. Perubahan Kebijakan: Selama sejarahnya, program KB di Indonesia mengalami berbagai perubahan kebijakan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Mulai dari kampanye promosi hingga penerapan program-program spesifik di tingkat lokal, kebijakan KB terus berkembang seiring dengan waktu.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Program Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Peningkatan Kepedulian Masyarakat Menggunakan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Rembang, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Alasan penggunaan metode kualitatif deskriptif karena untuk memberikan gambaran atas permasalahan yang diangkat bersifat dinamis dimana dapat berubah sesuai keadaan, bersifat kompleks karena menyangkut banyak pihak, holistik, dan juga penuh dengan makna.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Lokasi penelitian pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang yang berada di Jl. Pemuda No.Km.2, Rambut Malang, Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Serta untuk mempermudah dalam memperoleh data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang berhubungan dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

### **1.9.4 Jenis Data**

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016), metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel-variabel bebas, baik variabel tunggal maupun gabungan variabel, tanpa berupaya untuk membandingkan atau membangun hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data adalah metode kualitatif. Data kualitatif, sebagaimana yang didefinisikan oleh Sugiyono (2016, hlm. 14), adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal, tekstual, skematis, atau visual.

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian adalah menggunakan data kualitatif yang meliputi tata letak geografis, objek, data profil dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, efektivitas

program KB Kabupaten Rembang, keberhasilan program yang dilaksanakan, faktor penghambat dan pendorong program KB. .

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai narasumber atau informan yaitu orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melengkapi data guna menyelesaikan penelitian. Subjek penelitian nantinya akan mempengaruhi penelitian dari segi desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, sehingga dalam memilih subjek penelitian harus bersifat kredibel.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive* , menurut Sugiyono (2019 : 138) teknik *purposive* yaitu teknik memilih informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Berdasarkan teknik tersebut maka subjek penelitian ini terdiri dari :

1. Sub-bagian Pelayanan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera
2. Penyuluh Keluarga Berencana
3. Peserta KB

### **1.9.5 Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Dalam konteks penelitian sosial, data primer mengacu pada data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui wawancara. Responden ini



dipilih berdasarkan potensi mereka untuk memberikan informasi yang relevan dan autentik terkait bidang studi tertentu.

2. Data sekunder didefinisikan sebagai data yang mendukung data primer yang diperoleh dari literatur, dokumen, dan sumber lainnya. Data sekunder juga merupakan data yang berasal dari organisasi atau badan usaha tertentu yang mengalami tantangan dalam bidang yang sama dengan proyek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan bersumber dari instansi terkait, seperti Dinas Sosial PPKB Kabupaten Rembang.

#### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang disajikan dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan sejumlah metode dan teknik berbeda, yakni :

1. Pengamatan (*observation*)

Pada penelitian, observasi adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan tujuan memperoleh wawasan yang relevan dengan topik penelitian..

2. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Wawancara dengan informan merupakan komponen penting dari proses penelitian, yang memungkinkan peneliti memperoleh data melalui penggunaan pertanyaan, jawaban, dan diskusi. Interaksi ini memfasilitasi pengumpulan informasi dari individu yang memiliki

banyak pengetahuan tentang pokok bahasan dan penelitian yang sedang dilakukan.

Ketika wawancara, peneliti menggunakan teknik terstruktur dan semi-terstruktur, yang memerlukan tingkat penentuan awal yang berbeda dalam perumusan pertanyaan wawancara. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara merumuskan serangkaian pertanyaan terlebih dahulu, berdasarkan panduan wawancara. Sebaliknya, wawancara semi-terstruktur memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengajukan pertanyaan, di mana narasumber bebas menjawab secara terbuka, dan pewawancara dapat menanyakan pendapat dan ide mereka.

### 3. Dokumentasi.

Dokumentasi dapat diartikan sebagai catatan kejadian masa lalu. Dokumen dapat berbentuk berbagai macam, termasuk karya tulis yang diterbitkan, gambar, dan karya monumental yang dibuat oleh individu tertentu. (Burhan bungin, 2015:153) menunjukkan proses pemeriksaan retrospektif sumber data dan dokumen yang ada. Dokumen-dokumen ini dapat ditemukan dalam bentuk artikel terbitan, jurnal, disertasi, karya referensi, dan format serupa lainnya..

#### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Proses analisis data melibatkan pengumpulan data secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Sesuai dengan interpretasi Bogdan sebagaimana yang diuraikan dalam Sugiyono, analisis

data adalah metode pencarian dan pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan tambahan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemahaman dan komunikasi langsung kepada orang lain. Analisis data kualitatif merupakan pendekatan induktif yang mengandalkan analisis data yang diperoleh melalui pengamatan langsung.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Pada konteks analisis data, reduksi data dapat dipahami sebagai proses mengidentifikasi, memfokuskan, dan mengubah elemen-elemen penting dari data mentah. Hal ini terjadi melalui serangkaian operasi, termasuk memilih data, memfokuskan pada aspek-aspek utama, menyederhanakan struktur data, dan mengabstraksikan data ke dalam bentuk yang lebih mudah ditafsirkan. Kumpulan data yang dihasilkan adalah representasi dari data asli, yang mungkin telah dicatat dalam bentuk catatan lapangan. Reduksi data merupakan proses yang berkelanjutan selama berlangsungnya proyek penelitian kualitatif. Antisipasi reduksi data terbukti ketika peneliti, seringkali tanpa menyadarinya sepenuhnya, memutuskan kerangka konseptual area penelitian, masalah penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang akan dipilih. Saat pengumpulan data berlangsung, tahap reduksi lebih lanjut terjadi, termasuk meringkas, mengode, menelusuri tema, membuat klaster, membuat partisi, dan

membuat memo. Reduksi dan transformasi data ini berlanjut setelah kerja lapangan selesai, hingga laporan akhir yang lengkap disusun..

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan unsur-unsur yang tidak perlu, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga memudahkan penarikan simpulan akhir dan verifikasinya. Proses reduksi data tidak mengharuskan penafsiran data sebagai ukuran kuantitatif. Data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dengan berbagai cara, termasuk melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau deskripsi singkat, melalui kategorisasi ke dalam pola yang lebih luas, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, data dapat diubah menjadi nilai numerik atau peringkat yang diurutkan; namun, tindakan ini terkadang ceroboh.

## 2. Penyajian Data

Menurut Miles & Huberman (2002), penyajian data didefinisikan sebagai agregasi informasi yang sistematis, yang memungkinkan seseorang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Para ahli berpendapat bahwa penyajian yang unggul berfungsi sebagai saluran penting untuk memvalidasi analisis kualitatif. Hal tersebut mencakup berbagai alat analisis, termasuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Masing-masing alat ini dibuat untuk mensintesis informasi dengan cara yang terstruktur dan mudah diakses. Dengan demikian, seorang analis dapat memahami dinamika yang mendasarinya dan memastikan kelayakan kesimpulan yang diambil dari analisis yang disajikan.

### 3. Menarik Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan menurut pendekatan Miles & Huberman hanya mewakili satu aspek dari konfigurasi penelitian yang komprehensif. Kesimpulan juga divalidasi selama proses penelitian. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran sekilas yang melintasi pikiran analis (peneliti) saat menulis, tinjauan catatan lapangan, atau mungkin merupakan proses yang lebih menyeluruh dan menyeluruh yang melibatkan tinjauan dan pertukaran ide dengan kolega untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau bahkan upaya ekstensif untuk menempatkan salinan temuan dalam rangkaian data lain. Sebagai kesimpulan, interpretasi yang diperoleh dari data lain harus dievaluasi untuk kebenaran, ketahanan, dan relevansinya, yang secara kolektif menentukan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak muncul hanya selama fase pengumpulan data; sebaliknya, ia harus menjalani proses verifikasi untuk memastikan keakuratan dan keandalannya.

#### **1.9.8 Kualitas Data**

Pada konteks kegiatan penelitian, penilaian kualitas data terutama berkaitan dengan evaluasi uji validitas dan reliabilitas (Sugiyono, 2012:267). Namun, untuk menilai validitas data, peneliti dapat menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut (Sugiyono, 2012 : 274) diuraikan menjadi 3 jenis teknik yang terdiri dari triangulasi teknis, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber, berikut penjelasannya:

1. Triangulasi teknis merupakan teknik yang berguna untuk memeriksa keakuratan data dengan pengecekan data menggunakan referensi yang serupa dengan teknis atau metode yang tidak serupa. Contohnya mengecek data dari hasil wawancara, data hasil dokumentasi, dan data hasil observasi.
2. Triangulasi waktu merupakan teknik yang berguna untuk memeriksa keakuratan data yang diperoleh berdasarkan waktu yang tidak sama. Contohnya mengecek data Pelayanan Publik pada waktu yang berbeda.
3. Triangulasi sumber merupakan teknik yang berguna untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan sumber data lain yang telah memperoleh data sebelumnya.

Berdasarkan uraian pengertian jenis – jenis teknik triangulasi diatas, peneliti akan menerapkan teknik triangulasi sumber guna memeriksa valid tidaknya sebuah data yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti.